

ANALISIS PERBANDINGAN ADMINISTRASI PUBLIK NEGARA INGGRIS DAN AUSTRALIA

Anisa Syifa Maulida¹, Diva Deda Sepkamala², Safdha Herayani³, Wilda Haifa Ikrima⁴

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

e-mail: anisasyifaxx@gmail.com¹, divadedasepkamala@gmail.com², safdhaherayani1812@gmail.com³, haifawilda@gmail.com⁴

Abstrak

Artikel ini membahas tentang perbandingan administrasi publik negara Inggris dan Australia melalui analisis dari aspek bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dan sistem politik. Inggris merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem politik didasarkan pada asas demokrasi liberal, sedangkan Australia merupakan negara federasi yang terdiri dari negara bagian dan wilayah otonom. Sistem politik kedua negara ini berbeda. Sementara Australia memiliki sistem politik parlementer, Inggris memiliki tradisi politik yang panjang dan kaya yang mencakup sistem common law, parlemen Westminster, dan kebebasan berbicara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini secara khusus adalah tinjauan literatur dari karya-karya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Metode pendekatan yang dipilih berdasarkan literatur dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber sebelumnya, termasuk buku, situs web, dan jurnal untuk konfirmasi studi. Temuan studi ini menunjukkan bahwa administrasi di Inggris dan Australia berbeda satu sama lain dalam beberapa hal penting.

Kata kunci: *perbandingan administrasi; inggris; australia*

COMPARATIVE ANALYSIS OF PUBLIC ADMINISTRATION UNITED KINGDOM AND AUSTRALIA

Abstract

This article discusses the comparison of the public administration of the United Kingdom and Australia through the analysis of aspects of the form of state, form of government, system of government and political system. The UK is a constitutional monarchy with a political system based on the principles of liberal democracy, while Australia is a federation consisting of states and autonomous regions. The political systems of these two countries are different. While Australia has a parliamentary political system, the UK has a long and rich political tradition that includes the common law system, the Westminster parliament and freedom of speech. The secondary data used in this research is specifically a literature review of works related to the topic discussed. The chosen method of approach is literature-based where data is collected from various previous sources, including books, websites, and journals for confirmation of the study. The findings of this study show that the administrations in the UK and Australia differ from each other in several important ways.

Keywords: *administration comparison; united kingdom; australia*

PENDAHULUAN

Konsep administrasi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana tugas dan kegiatan berbagai tingkat dan jenis pekerjaan diatur secara sistematis dalam organisasi. Proses manajemen secara hirarki mempunyai tiga tugas pokok, yaitu: (1) pengendalian organisasi yang berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang; (2) fungsi manajemen organisasi yang berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai operasi berkelanjutan jangka panjang, seperti menyediakan bahan, fasilitas, instruksi dan menciptakan iklim yang diperlukan untuk proses produksi teknis atau profesional; (3) tugas pengendalian, yaitu pengendalian dan evaluasi atasan terhadap bawahannya dalam bidang akuntansi secara cermat, tegas, tepat dan benar. Proses fungsional organisasi seperti ketiga fungsi di atas merupakan arti penting tata kelola. Lalu apa yang dimaksud dengan administrasi publik? Administrasi publik adalah pelaksanaan seluruh kekuasaan administrasi publik melalui seluruh kemampuan aparatur negara dan eksploitasi serta penggunaan seluruh sumber daya dan sarana keuangan untuk menciptakan tujuan dan memenuhi tugas nasional. Dengan adanya pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa administrasi publik komparatif adalah ilmu yang mempelajari sistem kepegawaian dan administrasi publik dengan pendekatan komparatif. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk membandingkan model pemerintahan dari berbagai sudut pandang, antara lain membandingkan pemerintahan sebelum dan sesudah kemerdekaan, membandingkan pemerintahan tradisional dan modern, membandingkan pemerintahan monarki dan republik, dan lain-lain. administrasi publik, administrasi publik juga dilihat dari arus yang relatif berbeda, antar budaya, antara berbagai tatanan, misalnya antara orde lama dan orde baru, antara orde baru dan orde reformasi yang dialami di Negara Republik Indonesia.

Dalam perbandingan administrasi publik, administrasi juga dikaji dengan mempelajari unsur-unsur budaya yang terkandung di dalamnya. Membandingkan sistem pemerintahan dua negara atau lebih dengan lingkungan budaya yang berbeda. Hal ini disebabkan karena setiap negara mempunyai budaya yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi model kepemimpinan masing-masing negara. Studi perbandingan pemerintahan juga melihat lembaga-lembaga pemerintah yang tumbuh dan tinggal di suatu negara dan mengikuti sistem pemerintahan yang berbeda dalam tugasnya dan mungkin mengandung unsur-unsur yang sama.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana perbandingan administrasi publik Inggris dan Australia dalam hal analisis bentuk pemerintahan, bentuk pemerintahan, sistem administrasi dan sistem politik?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dan sistem politik Inggris dan Australia.
2. Untuk mengetahui analisis perbandingan administrasi publik antara Inggris dan Australia.

LANDASAN TEORI

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan ialah suatu hal yang mendasari pada suatu negara, yang menjadikan negara tersebut berjalan, serta menentukan bagaimana sistem yang digunakan dalam suatu pemerintahan di negara tersebut akan dilakukan. Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan dipahami sebagai sistem hubungan kerja antar lembaga negara. Sedangkan menurut Sarundajang (2012), sistem pemerintahan adalah istilah populer untuk suatu bentuk pemerintahan. Sistem pemerintahan ialah suatu sistem yang teratur. Susunan ini berisikan prinsip yang melandasi kegiatan dan hubungan kerja, seperti halnya antara lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Lembaga ini saling terkait dan berkesinambungan dalam satu kesatuan demi penyelenggaraan negara.

Ada berbagai jenis sistem pemerintahan, seperti sistem pemerintahan presidensial, semi-presidensial, monarki, parlementer, liberal, demokrasi, federal, dan lain sebagainya, dalam hal penyelenggaraan sistem pemerintahan, sistem pemerintahan dijalankan oleh pemerintah yaitu sekelompok orang yang berwenang

dalam berjalannya pemerintahan seperti halnya lembaga-lembaga negara yang ada pada negara tersebut. Intinya sistem pemerintahan ialah suatu sistem yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara seperti presiden, legislator, dan lain sebagainya yang saling bekerjasama untuk kemajuan yang dicita-citakan pada suatu negara.

Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan merupakan istilah yang dipakai terhadap pada suatu negara bagaimana negara tersebut menjalankan pemerintahannya. Bentuk pemerintahan merupakan rangkaian institusi politik yang digunakan untuk pengelolaan dalam sebuah negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap macam-macam politik yang hadir.

Dalam hal ini misalnya Inggris, menggunakan bentuk pemerintahan monarki konstitusional yang dimana dalam hal ini pemerintahan dipimpin oleh seorang raja/ratu serta dibantu oleh perdana menteri dan juga anggota-anggota parlemen lainnya. Hal ini berarti raja/ratu tidak bisa bertindak sewenang-wenangnya dalam memimpin negara.

Sistem Politik

Segala bentuk kegiatan politik yang ada pada suatu negara maupun dalam lingkup masyarakat yang berbentuk proses alokasi nilai-nilai dasar terhadap masyarakat serta melihat bagaimana hubungan yang fungsional diantara macam-macam kegiatan politik itu. Dalam hal ini Sistem politik saling berkaitan antara struktural dan fungsional. Dalam hal ini menurut Robert A. Dahl Sistem politik adalah pola hubungan yang tetap antar manusia yang saling melibatkan sesuatu yang luas mencakup seperti kekuasaan, aturan, serta kewenangan.

Bentuk Negara

Bentuk negara ialah susunan organisasi yang dijalan secara menyeluruh mengenai struktur negara, dalam hal ini meliputi berbagai unsur negara seperti penduduk, wilayah, dan juga pemerintahan. Bentuk negara berbicara tentang bagaimana susunan dasar negara serta juga tata tertib suatu negara yang berkaitan dengan bagian yang berada pada tingkatan paling atas di suatu negara tersebut dan juga masing-masing bagian tersebut merupakan bagian dalam kekuasaan negara. Terdapat dua bentuk negara, yaitu kesatuan dan serikat. Bentuk negara kesatuan yaitu bentuk negara yang bersatu, berdaulat, dan merdeka, dengan pemerintahan pusat yang menyelenggarakan penyelenggaraan negara. Sedangkan bentuk negara serikat adalah bentuk negara yang terdiri dari negara-negara bagian, dalam hal ini negara bagian menyerahkan atau melepaskan sebagian kekuasaannya agar diurus oleh negara serikat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Hal ini bertujuan untuk mengetahui suatu fenomena atau kondisi tertentu, data yang terkumpul berupa kata-kata (keyword). Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa studi literatur adalah mencari referensi teori yang sesuai dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal dan artikel, untuk menggali informasi mengenai administrasi negara di Inggris dan Australia sehingga dapat membandingkan administrasi publik dari keduanya negara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Negara di Negara Inggris dan Australia

Di Negara Inggris Bentuk Negaranya adalah kesatuan Monarki (Unitary State), dengan sebutan United Kingdom yang terdiri atas Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Bentuk Pemerintahan Negara Inggris yaitu Monarki Konstitusional dengan Raja/Ratu sebagai kepala Negara. Sistem Pemerintahan Inggris menganut sistem pemerintahan Parlementer, dengan itu yang berkuasa secara Rilya di dalam

pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dengan bantuan Kabinet dan aparatnya. Di Negara Australia Bentuk Negara nya adalah Federal atau Persemakmuran Inggris. Bentuk Pemerintahan Negara Inggris yaitu sebuah Monarki Federal. Australia menggunakan sistem pemerintahan parlementer dimana dalam hal ini diwakili oleh dewan perwakilan dan juga senat. Pemegang kekuasaan pada tingkat eksekutif dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen. Dalam hal ini maka menteri memiliki pertanggungjawaban terhadap parlemen.

Faktor Sejarah Negara Inggris dan Australia

Sejarah negara Inggris memiliki banyak faktor yang telah membentuknya menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Beberapa faktor sejarah yang signifikan termasuk:

1. Pendudukan Romawi. Pada abad pertama Masehi, Inggris diduduki oleh Romawi selama beberapa abad. Penaklukan ini memberikan pengaruh yang kuat dalam hal administrasi, bahasa, dan budaya. Kota-kota seperti London (dahulu Londinium) didirikan selama masa ini.
2. Penaklukan Norman. Pada tahun 1066, Inggris ditaklukkan oleh William Sang Penakluk dari Normandia dalam Pertempuran Hastings. Ini mengakibatkan pengaruh bahasa dan budaya Norman yang signifikan dalam masyarakat Inggris.
3. Magna Carta. Pada tahun 1215, Raja John dari Inggris dipaksa untuk menandatangani Magna Carta, yang menjadi dasar bagi perlindungan hukum dan hak-hak individual. Dokumen ini menjadi landasan bagi perkembangan konstitusional dan perlindungan hak-hak warga di masa mendatang.
4. Perang Seratus Tahun. Perang Seratus Tahun (1337-1453) antara Inggris dan Perancis berdampak pada stabilitas politik dan perubahan sosial di Inggris. Konflik ini juga membantu memperkuat identitas nasional Inggris.
5. Reformasi Protestan. Pada abad ke-16, Inggris mengalami Reformasi Protestan yang dipimpin oleh Raja Henry VIII dan kelanjutannya di bawah pemerintahan Ratu Elizabeth I. Ini mengakibatkan pemisahan Gereja Inggris dari Gereja Katolik Roma dan perubahan agama negara.
6. Revolusi Industri. Pada abad ke-18, Inggris mengalami Revolusi Industri yang mengubah masyarakat dan ekonomi secara drastis. Perkembangan industri, seperti pertambangan batu bara dan pabrik tekstil, membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, urbanisasi, dan perubahan sosial.
7. Kekuasaan Imperium Britania. Inggris membangun Kekaisaran Britania Raya yang luas pada abad ke-19, dengan koloni dan wilayah jajahannya yang tersebar di seluruh dunia. Kekuasaan ini memberikan pengaruh besar dalam politik, ekonomi, dan budaya, serta membentuk citra Inggris sebagai kekuatan global.
8. Perang Dunia dan Dekolonisasi. Inggris terlibat dalam kedua Perang Dunia dan mengalami perubahan signifikan akibatnya. Setelah Perang Dunia II, proses dekolonisasi dimulai, dan banyak koloni Britania meraih kemerdekaan, yang mengubah posisi Inggris dalam dunia.

Faktor-faktor sejarah ini, bersama dengan peristiwa dan kejadian lainnya, telah membentuk negara Inggris menjadi apa yang kita kenal sekarang, dengan sistem pemerintahan, budaya, dan identitas nasional yang unik. Faktor sejarah yang signifikan dalam pembentukan negara Australia meliputi:

1. Penjajahan oleh Britania Raya. Pada akhir abad ke-18, Britania Raya mulai mengirim para tahanan ke wilayah yang kemudian menjadi Australia. Permukiman awal didirikan di Sydney pada tahun 1788 dengan tujuan awal sebagai penjara. Perkembangan koloni penjara ini menjadi awal dari pendirian permukiman-permukiman lain di seluruh wilayah Australia.
2. Misi Eksplorasi. Eksplorasi yang dilakukan oleh penjelajah Eropa, seperti James Cook, membuka jalan bagi penjajahan lebih lanjut di Australia. Pendaratan Cook di Botany Bay pada tahun 1770 membuka jalan bagi penjajahan Britania Raya di wilayah ini.

3. Pemukiman dan Ekspansi. Pada abad ke-19, pemukiman dan ekspansi kolonial di Australia terus berkembang. Penggalian emas di Victoria pada tahun 1851 menarik imigran dari seluruh dunia, yang membantu pertumbuhan populasi dan ekonomi Australia.
4. Federasi. Proses federasi dimulai pada akhir abad ke-19 dan berakhir pada tahun 1901 dengan pembentukan negara Australia sebagai negara-negara bagian yang bersatu. Proses ini menghasilkan pembentukan Konstitusi Australia, yang mengatur hubungan antara pemerintah federal dan negara bagian.
5. Perang Dunia I dan II. Australia berperan dalam Perang Dunia I dan II sebagai bagian dari Persemakmuran Britania Raya. Partisipasi Australia dalam perang ini memainkan peran penting dalam pembentukan identitas nasional dan hubungan Australia dengan negara-negara lain di dunia.
6. Multikulturalisme dan Imigrasi. Setelah Perang Dunia II, Australia mengadopsi kebijakan imigrasi yang lebih terbuka, yang menghasilkan gelombang imigran dari berbagai negara. Ini membentuk masyarakat Australia yang multikultural dan beragam secara budaya.
7. Dekolonisasi dan Kemandirian. Proses dekolonisasi pasca-Perang Dunia II berdampak pada beberapa wilayah Australia, seperti Papua Nugini yang dulunya adalah wilayah jajahan Australia. Pada tahun 1975, Papua Nugini meraih kemerdekaan dan menjadi negara yang terpisah dari Australia.
8. Pengakuan Hak Pribumi. Pengakuan hak-hak pribumi Australia menjadi faktor penting dalam sejarah negara ini. Gerakan untuk pengakuan dan hak-hak yang adil bagi penduduk asli Australia, yang dikenal sebagai Aborigin dan Torres Strait Islander, semakin meningkat pada abad ke-20 dan masih menjadi isu penting hingga saat ini.

Faktor-faktor sejarah ini telah memainkan peran penting dalam membentuk negara Australia, menghasilkan identitas nasional, sistem pemerintahan, dan kebijakan sosial yang ada saat ini.

Sistem Pemilihan Umum Di Negara Inggris Yang Berdasarkan Demokrasi

Inggris merupakan negara kesatuan (United Kingdom) yang dibentuk pada tahun 1707 terbagi atas 18 wilayah mencakup Wales, Irlandia Utara, Skotlandia, dan juga England. Inggris menjalankan sistem monarki pada abad ke-9, Inggris merubah sistem monarkinya menjadi monarki konstitusional pada abad ke-17. Sistem pemerintahan yang hadir pada negara Inggris dijalankan berdasarkan konstitusi yang tidak tertulis. Inggris merupakan salah satu dari sekian negara didunia yang tidak memiliki konstitusi tunggal serta tertulis. Inggris hanya memberlakukan konvensi-konvensi hukum yang berlaku bagi umum, kebiasaan yang sudah tradisional serta banyaknya bagian-bagian yang sudah terpisah dari hukum tata negara. Konstitusi kerajaan Inggris tidak memiliki bentuk yang terkodifikasi, tetapi aturan hukum yang mencakup berbagai hal tertentu dan saling terpisah menggunakan istilah "constitution".

Monarki konstitusional adalah Raja atau Ratu yang dijadikan simbol kedaulatan negara sehingga Raja atau Ratu tidak memiliki kekuasaan terhadap politik yang hadir. Dalam hal ini roda pemerintahan dijalankan oleh lembaga-lembaga yang ada, seperti lembaga eksekutif oleh Perdana Menteri, dalam hal ini Perdana Menteri dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi dalam hal ini Raja atau Ratu dan Perdana Menteri tidak berada pada posisi yang saling bertentangan. Pada sistem pemerintahan Inggris menjalankan sistem pemerintahannya menggunakan sistem Parlementer.

Sistem parlementer adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana parlemen memiliki peran yang cukup besar bagi jalannya pemerintahan. Parlemen yang hadir dalam pemerintahan memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri serta dapat memberhentikan pemerintah yang memimpin negara melalui berbagai macam cara untuk menjalankan kewenangannya seperti salah satunya mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Kekuasaan pemerintah terdapat pada perdana menteri serta jajarannya yang disebut kabinet.

Dalam sistem konstitusional Inggris, parlemen, yang juga dikenal sebagai House of Commons dan House of Lords, memiliki kekuasaan legislatif. House of Commons dapat meminta Perdana Menteri untuk

mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan umum yang dilakukan oleh House of Commons dengan meloloskan mosi tidak percaya atau dengan menarik dukungan untuk Perdana Menteri. House of Lords adalah majelis tinggi Parlemen Britania Raya, tetapi tidak memiliki kendali atas masa jabatan junjungan tinggi.

Dalam struktur pemerintahan Kerajaan Inggris, Raja memiliki hubungan khusus dengan Perdana Menteri. Namun, secara konstitusional, Raja harus netral dan tidak memiliki wewenang untuk terlibat dalam urusan pemerintahan. Namun, Raja memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya kepada Perdana Menteri tentang bagaimana pemerintahan berjalan. Raja dan Perdana Menteri memiliki waktu khusus secara berkala untuk berbicara satu sama lain. Sistem parlemen bikameral Inggris merupakan cikal bakal sistem parlemen bikameral di negara lain seperti Indonesia dan Amerika Serikat. Model parlemen ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi.

Inggris disebut sebagai *The Mother of Parliaments* atau pelopor sistem parlementer. Sistem parlementer ini berhasil diterapkan di Inggris, dan diikuti oleh negara-negara lain. Melalui pemilihan umum yang demokratis dan prosedur legislatif, Inggris Raya mampu mengatasi kesulitan sosial ekonomi, yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan di negara tersebut. Inggris terkenal dengan sistem bipartainya, yang mencakup pemerintahan mayoritas satu partai yang kuat dan transisi kekuasaan yang teratur antara Partai Konservatif dan Partai Buruh. Dari tahun 1945 hingga 1987, pemilih berpindah dari Partai Konservatif ke Partai Buruh sebanyak enam kali.

Partai yang memenangkan dalam pemilihan umum akan menjadi partai yang berkuasa dalam periode itu dan akan bertanggung jawab sebagai bentuk upaya dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini partai lain yang muncul seperti partai-partai yang tidak menang dalam pemilihan umum memiliki tanggung jawab dalam menstabilkan jalankan pemerintahan sehingga partai yang menang tersebut dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya. Partai yang kalah atau disebut juga partai oposisi secara teorinya tidak ikut dalam berpartisipasi dalam proses pembuatan suatu kebijakan.

Secara umum, struktur pemerintahan Inggris menetapkan batasan kewenangan yang jelas antara cabang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sistem ini berfungsi sebagai pusat bagi negara-negara yang bernaung di bawahnya. Penulis berbicara tentang sistem kepartaian negeri Ratu Elizabeth sebelum memasuki sistem pemilu di Inggris. Inggris menggunakan sistem bipartai, yang berarti ada dua partai di antara beberapa partai. Partai-partai ini secara bergantian menempati posisi tertinggi dan menang dalam pemilihan umum. Hanya ada dua partai politik dalam struktur dua partai ini: partai yang berkuasa dan partai oposisi. Partai yang kalah berperan sebagai pengkritik kebijakan partai yang berkuasa, dengan pengertian bahwa peran ini dapat berpindah tangan kapan saja.

Dua partai besar di Inggris, Partai Buruh dan Partai Konservatif, memiliki keyakinan dan tujuan politik yang serupa. Selain kedua partai ini, lanskap politik Inggris juga dihiasi oleh sejumlah partai kecil lainnya. mirip dengan Partai Hijau, yang merupakan partai paling kiri. Partai Buruh adalah organisasi sayap kiri. Partai paling kanan adalah UKIP (*United Kingdom Independent Party*), yang diikuti oleh Partai Konservatif yang berada di tengah, dan Partai Demokrat. Kebijakan yang diterapkan partai-partai ini ketika berkuasa juga sangat bergantung pada posisi mereka dalam kompas politik.

Partai-partai yang berada pada sayap kiri memiliki pemikiran yang lebih sosialis serta juga dalam tindakan mereka, partai-partai yang berada di sayap kanan akan menjalankan apa yang ada di ideologinya. Dalam hal ini partai sayap kanan maupun sayap kiri akan mementingkan atau mendahulukan kepentingan nasional, sehingga memungkinkan kedepannya partai tersebut akan menyerap ideologi/pemikiran dari partai oposisinya, hal ini dilakukan tidak lain untuk menjalankan pemerintahan agar berjalan dengan baik dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi kedepannya.

Dengan cara yang sama, ada yang disebut sebagai kandidat independen, yang terdiri dari individu yang sangat populer sehingga mereka dapat dipilih tanpa berpartisipasi dalam partai politik. Selain itu, ada partai politik khusus yang tidak memiliki kursi di parlemen tetapi memilih anggota pemerintahan lokal, yaitu

The Official Monster Raving Loony Party, yang terdiri dari orang-orang aneh yang mengenakan pakaian yang aneh dan berwarna-warni.

Pada umumnya, pemimpin partai yang memenangkan pemilihan umum dan memiliki suara terbanyak di parlemen akan menduduki posisi perdana menteri. Rival yang tidak mendapatkan mayoritas kursi akan duduk sebagai oposisi dan membentuk kabinet bayangan. Kabinet bayangan ini dibentuk sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pemimpin Oposisi akan mengawasi Perdana Menteri, dan Menteri Pendidikan Bayangan akan mengkritik Menteri Pendidikan. Semua ini akan diangkat dalam debat terbuka dan tertutup di House of Commons, yang merupakan salah satu bagian dari parlemen Inggris yang terletak di Westminster.

Pemerintah akan mempertahankan inisiatifnya selama diskusi ini dan menanggapi pertanyaan dari semua anggota parlemen. Sebelum kebijakan tersebut diperluas dan tersedia untuk umum, mereka juga akan memberikan klarifikasi. Mengingat struktur demokrasi yang menempatkan pemerintah di satu sisi dan pengawas pemerintah di sisi lain yang mengawasi dan terkadang harus memblokir rencana, hal ini dilakukan di parlemen. Sistem politik di Inggris beroperasi dengan cara yang mungkin terlihat cukup agresif untuk memastikan bahwa setiap pendapat didengar di parlemen.

Bersama dengan Partai Demokrat Liberal, Partai Konservatif membentuk koalisi dan kabinet federal. Untuk mempersiapkan pertarungan dalam pemilihan umum berikutnya, Partai Buruh akan bertindak serupa selama tahun-tahun ini dengan menciptakan koalisi dengan partai-partai yang berbeda. Meskipun mendapat kritik dari partai-partai lain, Partai Konservatif mampu mengendalikan pemerintahan pada tahun 2017 berkat mayoritas kursi yang tipis. Sistem politik kota, yang terdiri dari dewan yang dipimpin oleh anggota dewan, juga mendukung sistem politik federal. Kami juga memiliki distrik, yang terdiri dari beberapa dewan dan diawasi oleh walikota dalam skala yang lebih besar. Ada lebih dari 30 dewan di London saja, yang dipimpin oleh walikota London yang bertugas di Majelis London. Selama bertahun-tahun, sistem politik Britania Raya telah membantu negara ini mempertahankan posisinya sebagai negara besar.

Secara konseptual, Inggris melakukan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif. Dengan sistem bipartai, Inggris diperkuat dengan penggunaan sistem pemilu dengan satu wakil (single-member constituency) (Sistem Distrik). Sistem distrik adalah sistem pemilu di mana seluruh negara dibagi menjadi daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang tersedia untuk parlemen. Sistem ini juga dikenal sebagai konstituensi dengan satu wakil karena setiap daerah pemilihan hanya memilih satu wakil dari kandidat yang diajukan oleh masing-masing partai politik. Partai yang menerima mayoritas suara di daerah pemilihan adalah yang menang.

Pemilihan Umum di Negara Australia Berdasarkan Demokrasi.

Negara Australia adalah monarki konstitusional dengan pemisahan kekuasaan federal. Pemerintahan Australia memiliki sistem pemilihan umum yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu Raja Charles, Australia yang terpisah dari statusnya sebagai raja di masyarakat dunia lainnya. Raja berdomisili di Britania Raya dan diwakili oleh perwakilan di Australia, berjalan atas perintah menteri. Kekuasaan eksekutif tertinggi dipegang oleh Konstitusi Australia, namun Gubernur Jenderal secara konstitusional diberi wewenang untuk melaksanakan hal ini. Bertentangan dengan tuntutan Perdana Menteri, Gubernur Jenderal menggunakan kekuasaan alternatif untuk membubarkan pemerintahan Whitlam jika terjadi krisis konstitusional.

Australia mempunyai tiga pemerintahan:

1. Pemerintah Federal, Pemerintah federal Australia berpusat di Canberra dan dipimpin oleh Perdana Menteri Australia. Ini adalah tingkat pemerintahan yang mengurus masalah nasional, seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan perpajakan federal.
2. Pemerintah Negara Bagian dan Teritori, Setiap negara bagian dan teritori memiliki pemerintahan sendiri yang mengurus berbagai masalah di tingkat negara bagian atau teritori, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

3. Pemerintah Lokal, Di bawah tingkat negara bagian dan teritori, terdapat pemerintahan lokal yang mengurus masalah di tingkat lokal atau daerah. Australia memiliki banyak pemerintahan lokal, seperti dewan kota dan dewan shire, yang mengurus infrastruktur, perencanaan perkotaan, dan layanan komunitas di daerah mereka masing-masing.

Sistem pemilihan umum di Australia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, yang memberikan suara kepada rakyat, akan membuat keputusan atas nama mereka di parlemen. Sistem pemilihan umum di Australia berusaha untuk menciptakan representasi yang adil dan inklusif bagi semua warga negara. Dengan adanya sistem preferensi, pemilih memiliki lebih banyak kontrol atas hasil pemilihan, dan hal ini mendorong partisipasi aktif dalam proses demokratis. Australia memiliki beberapa jenis pemilihan, tetapi yang paling penting adalah pemilihan umum untuk Parlemen Australia (Parlemen Federal) dan Parlemen masing-masing negara bagian dan teritori. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai sistem pemilihan umum di Australia:

1. Pemilihan Umum Federal: Pemilihan umum federal di Australia digunakan untuk memilih anggota Parlemen Australia, Perwakilan Rakyat memiliki anggota yang dipilih secara langsung dalam masing-masing distrik pemilihan (electorate) di seluruh Australia. Senat memiliki anggota yang dipilih dari negara bagian dan teritori dengan metode preferensial.
2. Metode Preferensial: Australia menggunakan sistem preferensial untuk pemilihan umum. Dalam sistem ini, pemilih memberikan peringkat kepada calon-calon dalam urutan yang diinginkan pada surat suara mereka. Ini memungkinkan pemilih untuk menyatakan preferensi sekunder jika calon pilihan pertama mereka tidak memenangkan suara mayoritas langsung. Sistem ini memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki dukungan mayoritas.
3. Kewajiban Memilih: Di beberapa negara bagian dan teritori Australia, pemilih diwajibkan untuk memilih dalam pemilihan umum. Ini berarti bahwa warga yang memiliki hak pilih harus memberikan suara atau memberikan alasan sah jika mereka tidak dapat memberikan suara.
4. Kandidat Independen dan Partai Politik: Selain partai politik besar seperti Liberal, Labor, dan lain-lain, Australia juga memiliki banyak kandidat independen yang dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum.
5. Pemilihan Negara: Setiap negara memiliki sistem pemilihan sendiri untuk memilih anggota parlemen mereka. Meskipun prinsip-prinsip dasar demokrasi representatif seringkali sama, ada variasi dalam cara pemilihan ini diadakan di masing-masing negara bagian dan teritori.
6. Pemilihan Lokal: Pemilihan lokal untuk pemerintahan daerah seperti dewan kota atau dewan shire juga diadakan di seluruh Australia.
7. Sistem Preferensial Berjenjang: Sistem preferensial berjenjang, yang juga dikenal sebagai "sistem suara alternatif," digunakan dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat federal dan dalam pemilihan negara bagian di beberapa tempat. Dalam sistem ini, pemilih memberikan peringkat kepada calon-calon dalam urutan yang diinginkan, yang memungkinkan calon dengan dukungan minoritas untuk bersaing dengan peluang yang lebih baik.

Terkaitan yang dimiliki Australia untuk memperkuat pemerintahan dimana Jervis Bay Territory wilayah di Australia, Negara Australia memiliki hubungan eksternal dengan Amerika Serikat dan Australia dari liberalisasi dalam perdagangan internasional dengan itu penjelasan dibawah ini :

1. Jervis Bay Territory, wilayah teritori di Australia yang memiliki status istimewa. Wilayah ini terletak di pantai timur Australia, sekitar 200 kilometer (124 mil) di selatan Sydney. Jervis Bay Territory adalah wilayah teritorial yang dikelola oleh Pemerintah Australia Capital

- Territory (ACT), tetapi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari wilayah-wilayah teritorial lainnya di Australia.
2. Hubungan eksternal, Australia dan Amerika Serikat adalah sekutu dalam bidang keamanan dan pertahanan. Hubungan militer mereka dikenal sebagai "ANZUS Treaty" (Perjanjian ANZUS), yang merupakan perjanjian pertahanan bersama antara Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Meskipun Selandia Baru ditarik dari perjanjian ini pada tahun 1986, Australia dan Amerika Serikat terus menjaga hubungan militer yang erat. Australia telah mendukung Amerika Serikat dalam berbagai konflik, termasuk Perang Dunia II, Perang Vietnam, dan Perang di Afghanistan. Pada tahun 2005, Australia menjadi bagian dari KTT yang ada di ASEAN sehingga menjadi KTT ASEAN-Australia. Hal ini dilakukan untuk menjaga perjanjian persahabatan dan kerjasama yang diinginkan oleh pihak-pihak tersebut. Australia juga merupakan negara persemakmuran, yang dimana jika ada perkumpulan bagi negara-negara persemakmuran Australia menggunakan forum tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan dan menjalin kerjasama.
 3. Australia adalah salah satu negara yang sangat ter liberalisasi dalam hal perdagangan internasional. Negara ini memiliki ekonomi yang terbuka dan aktif dalam berbagai perjanjian perdagangan dan organisasi internasional. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam perdagangan internasional Australia :
 - 1) Mitra Dagang Utama: Australia memiliki mitra dagang utama, termasuk Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan berbagai negara di Uni Eropa. Ekspor Australia mencakup berbagai barang seperti bijih besi, batu bara, gas alam cair, daging, dan lainnya.
 - 2) Perjanjian Perdagangan: Australia telah mengadakan berbagai perjanjian perdagangan, termasuk Perjanjian Perdagangan Bebas Australia-AS (Australia-US Free Trade Agreement), yang mencakup sejumlah besar mitra dagangnya.
 - 3) Sektor Pertanian dan Makanan: Australia memiliki ekspor pertanian yang kuat, termasuk daging, gandum, susu, dan anggur. Produk makanan Australia, terutama yang berkualitas tinggi, memiliki reputasi yang baik di pasar internasional.
 - 4) Tambang dan Energi: Australia adalah salah satu produsen bijih besi, batu bara, gas alam, dan mineral lainnya terbesar di dunia. Ini menjadikan sektor pertambangan dan energi sebagai salah satu pilar ekspor utama Australia.
 - 5) Investasi Asing: Australia juga menjadi tujuan investasi asing yang menarik. Banyak perusahaan asing beroperasi di Australia, terutama dalam sektor pertambangan, keuangan, dan teknologi.
 - 6) Regulasi Perdagangan: Australia memiliki peraturan perdagangan yang transparan dan terbuka, serta badan regulasi yang memantau kepatuhan dengan peraturan tersebut. Ini membuat Australia menjadi tempat yang menguntungkan untuk berbisnis.
 - 7) Perubahan Lingkungan Perdagangan Global: Seperti negara-negara lain, Australia juga terpengaruh oleh perubahan dalam lingkungan perdagangan global. Perang dagang dan isu-isu perdagangan yang kompleks dapat mempengaruhi ekonomi Australia.
 - 8) Isu Lingkungan dan Keberlanjutan: Australia semakin memperhatikan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan dalam perdagangannya. Ini mencakup peningkatan permintaan untuk produk-produk yang ramah lingkungan dan upaya untuk mengurangi dampak ekspor pertambangan terhadap lingkungan.

Sistem Politik Negara Inggris dan Australia

Suprastruktur politik, merupakan lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi serta menjalankan kegiatan dalam suatu negara, suprastruktur politik Inggris terdiri atas:

1. Kekuasaan legislatif, diisi oleh parlemen Inggris yang terbagi atas dua majelis, yaitu Majelis Tinggi (House of Lords) dan Majelis Rendah (House of Commons).
2. Kekuasaan eksekutif, diisi oleh raja/ratu yang memerintah negara Inggris saat ini, untuk saat ini kekuasaan eksekutif Inggris dipegang oleh Raja Charles III (King Charles III) yang tahtanya diturunkan dari ibunya yaitu Ratu Elizabeth II (Queen Elizabeth II). Dibawah kekuasaan Raja/Ratu, Inggris juga dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri memiliki 20 orang menteri kabinet yang membantunya.
3. Kekuasaan yudikatif, badan yudikatif tidak terdapat dalam konstitusi tertulis di negara Inggris, maka demikian badan yudikatif dirasa tidak diperlukan. Dalam hal ini kekuasaan pemerintah tidak dibatasi oleh hukum, melainkan dengan keyakinan yang diyakini oleh masyarakat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Pengadilan tidak menentukan ruang lingkup kewenangan pemerintah, karena tidak ada konstitusi tertulis yang menolak legalitas undang-undang yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Infrastruktur politik, merupakan kekuasaan politik yang tidak secara nyata nampak, akan tetapi sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik di suatu negara. Infrastruktur politik ini merupakan partai-partai yang berada di suatu negara yang keberadaannya ini sangat berpengaruh terhadap arah dan tujuan negara kedepannya. Dalam hal ini partai-partai politik di negara Inggris yang sangat berpengaruh ialah:

1. Partai konservatif, memegang mayoritas isi orang di parlemen
2. Partai buruh, sebagai oposisi utama
3. Partai liberal dan partai sosial demokrat

Suprastruktur politik yang ada di negara Australia, terdiri atas:

1. Kekuasaan legislative, diisi oleh parlemen tingkat pusat yang bersifat bicameral, yaitu House of Representatives yang terdiri atas Majelis Rendah atau DPR dan Senat yang merupakan Majelis Tinggi. Majelis Rendah dan Majelis Tinggi bertanggung jawab atas penetapan/penggunaan UU dalam skala nasional. Majelis Tinggi menyarankan sebagian besar rancangan terhadap UU yang berisikan 148 anggota.
2. Kekuasaan eksekutif, diisi oleh Raja/Ratu yang berkuasa di Inggris serta para Gubernur Jenderal. Dalam hal ini Raja/Ratu yang berkuasa di Inggris tidak turut andil dalam sistem politik Australia, namun hanya sebagai simbol atau figur. Raja/Ratu secara resmi diwakili oleh Gubernur Jenderal, namun dalam hal ini Raja/Ratu tidak memiliki andil apapun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Gubernur Jenderal. Kekuasaan Gubernur Jenderal diperoleh dari penunjukkan Raja/Ratu Inggris atas Usulan Perdana Menteri. Serta Perdana Menteri yang jabatannya dipilih langsung oleh rakyat yang jabatannya sepenuhnya ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan umum.
3. Kekuasaan yudikatif, diisi oleh pengadilan tinggi, mahkamah agung, pengadilan negara tingkat rendah, serta lembaga pengadilan lainnya.

Infrastruktur politik Australia, ada tiga partai besar di Australia yang mendominasi perpolitikan di negara Australia, antara lain:

1. Partai Nasional
2. Partai Liberal
3. Partai Buruh

Partai Liberal dan Nasional masing-masing memiliki kecenderungan liberal dan konservatif, sedangkan partai buruh memiliki haluan ideologis sosialis. Pemilihan umum yang terjadi di negara Australia hukumnya wajib bagi seseorang yang usianya minimal 18 tahun, jika orang tersebut tidak datang pada saat pemilu, maka petugas dapat secara paksa menjemput orang tersebut untuk menggunakan hak suaranya.

KESIMPULAN

Inggris memiliki sistem monarki konstitusional dengan Ratu sebagai kepala negara. Meskipun peran Ratu sebagian besar bersifat seremonial, keberadaannya memberikan stabilitas institusional dan simbolisme nasional yang penting. Sistem Parlemerter: Inggris memiliki sistem parlementer di mana perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Kemampuan seorang pemimpin politik untuk memenangkan dukungan mayoritas di Parlemen dan pemimpin partainya dengan efektif menjadi faktor penting dalam kepemimpinan negara ini. Tradisi Politik dan Sejarah: Inggris memiliki tradisi politik yang kaya dan panjang, termasuk sistem hukum umum, parlemen Westminster, dan kebebasan berpendapat. Sejarah kolonialisme dan kekuasaan imperialis Inggris juga mempengaruhi peran dan persepsi kepemimpinan negara ini.

Australia juga memiliki sistem parlementer dengan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri dipilih oleh anggota Parlemen yang terpilih dan harus mempertahankan dukungan mayoritas untuk tetap berkuasa. Federalisme adalah negara federasi yang terdiri dari negara bagian dan wilayah otonom. Pemimpin federal harus bekerja sama dengan pemerintah negara bagian dan mengatasi tantangan koordinasi antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Kekuatan Partai Politik di Australia memiliki peran yang kuat dalam menentukan kepemimpinan negara. Pemimpin partai yang memenangkan dukungan mayoritas dalam pemilihan umum akan menjadi perdana menteri dan memimpin pemerintahan. Multikulturalisme: Australia adalah masyarakat multikultural dengan populasi yang beragam. Pemimpin negara perlu mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama dalam kebijakan dan kepemimpinannya. Hubungan dengan Negara Inggris masih memiliki hubungan konstitusional dengan Inggris sebagai negara persemakmuran. Meskipun peran Inggris dalam pemerintahan Australia terbatas, hubungan ini dapat mempengaruhi persepsi kepemimpinan dan kebijakan Australia. Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ini hanya memberikan gambaran umum, dan kepemimpinan di kedua negara juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti ideologi politik, isu-isu kebijakan, dan karakteristik individu pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2012). *Perbandingan Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia.
- Britannica, E. (n.d.). *Ringkasan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara*. Retrieved from https://www-britannica-com.translate.googleusercontent.com/summary/United-Kingdom?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc diakses pada tanggal 10 Juni 2023
- Kompas. (2021). *Bentuk dan Sistem Pemerintahan yang Berlaku Dunia*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/08/190000969/bentuk-dan-sistem-pemerintahan-yang-berlaku-dunia> diakses pada tanggal 19 Juni 2023
- Lintangsari, P. A. (2011, Oktober). *Sejarah Australia*. Retrieved from <https://id.scribd.com/doc/78921600/Sejarah-Australia> diakses pada tanggal 10 Juni 2023
- Mandala, E. (2015, Juni). *Sekilas Sejarah Berdirinya Negara Inggris*. Retrieved from <https://www.pinhomelid.com/blog/berdirinya-inggris/> diakses pada tanggal 10 Juni 2023
- Risma Wati, W. W. (2023). Analisis Perbandingan Administrasi Publik Negara China dan Rusia. *PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik, 1 No 1*. diakses pada tanggal 12 Juni 2023
- Riswana, R. (2019). *Perbandingan Sistem Administrasi Negara Inggris dan Negara Australia*. Retrieved from

<https://id.scribd.com/document/454901828/perbandingan-inggris-dan-australia> diakses pada tanggal 19 Juni 2023

Siregar, N. F. (2021). *Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Inggris dalam Negara Demokrasi*. Retrieved from <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16129/SKRIPSI%20NUR%20FADLA%20ZIADA%20SIREGAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 13 Juni 2023